DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2024—2025
SELASA, 24 JUNI 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI; dan**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025.

Selamat datang, bagi seluruh Anggota DPR RI, yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya; menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI.

Pembangunan nasional bukan hanya membangun gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya, akan tetapi juga menyediakan pelayanan bagi rakyat, mengatur kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan religius; membangun Sumber Daya Manusia; mengelola lingkungan hidup; menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan lain sebagainya.

Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu

apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik? Fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju? Rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram? Rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera? Dan lain sebagainya yang pada intinya rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik.

DPR RI dan Pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat.

DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 (empat) pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; sehingga tidak berlarut-larut.

Kehadiran Negara yang ditunjukan dengan tindakan Pemerintah yang cepat, tepat, akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak, selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua.

Sidang Dewan yang Terhormat,

DPR RI akan melanjutkan pembahasan 8 (delapan) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada dalam tahap Pembicaraan Tingkat I yang terdiri atas:

- 3 (tiga) RUU Usul DPR RI;
- 3 (tiga) RUU Usul Pemerintah; dan
- 2 (dua) RUU Daftar Kumulatif Terbuka.

Tujuh di antaranya adalah Rancangan Undang-Undang *carry over* dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya.

Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari prespektif kepentingan para pihak yang diatur dalam undang-undang; oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan undang-undang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada masa sidang ini DPR RI akan melakukan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun

Anggaran 2026 dan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Tahun depan, perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu; Konflik geopolitik, geo-ekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif; yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.

Oleh karena itu, Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional.

KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, akan difokuskan pada efektivitas pencapaian dan efisiensi pelaksanaannya serta evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan APBN tahun-tahun berikutnya.

DPR RI akan mencermati dengan seksama agar kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN, selalu memenuhi prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain:

1. tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja;

2. permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025;
3. penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
4. permasalahan ojek *online*;
5. pengoplosan gas bersubsidi;
6. pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik; dan
7. posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi.

Selanjutnya, pada masa sidang ini DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan Anggota Dewan Komisioner LPS.

DPR RI akan terus menjalankan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk membangun hubungan kerja sama antarparlemen. Kegiatan diplomasi tersebut berperan penting dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia.

Pada masa sidang ini DPR RI akan menerima kehadiran delegasi dari beberapa negara, antara lain duta besar dari Ekuador, Afrika Selatan, Syprus, dan delegasi Belanda.

Ada pun kunjungan delegasi Indonesia akan dilakukan ke negara Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, China,dan Jepang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan pada masa persidangan ini.

Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

Selanjutnya, DPR RI akan memasuki Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024—2025.

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh

rakyat Indonesia bahwa masa sidang ini akan dimulai sejak hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025.

Kepada Anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan **"SELAMAT BEKERJA MENJALANKAN KEDAULATAN RAKYAT dan MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT"**.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

Terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN:

- **Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I:**
  1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (*carry over*);
  2. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (*carry over*);
  3. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (*carry over*);
  4. RUU tentang Hukum Acara Perdata (*carry over*);
  5. RUU tentang Narkotika dan Psikotopika (*carry over*);
  6. RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara (*carry over*);
  7. RUU tentang Perubahaan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (*carry over*/RUU Kumulatif Terbuka); dan

8. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam concerning the Delimination of the Exclusive Economic Zone Boundary*).

- **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

  Sidang yang akan dihadiri oleh delegasi DPR RI antara lain:

  1. APA Standing Committee on Political Affairs di Mashad, Iran (17—20 Juni 2025);
  2. National Parliamentary Dialogue on Promoting Women's Political Participation and Leadership (WPPL) di Brunei Darussalam (17—19 Juni 2025);
  3. 2nd Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue di Roma, Italia (19—20 Juni 2025);

4. Konferensi Pemuda Indonesia untuk Gaza Palestina di Bandung (12 Juli 2025);
5. 16th AIPA Caucus di Kamboja (14—17 Juli 2025); dan
6. Parliamentary Forum at the 2025 UN HLPF di New York, AS (22 Juli 2025).